

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

(Asriani¹), (Prof. Ansar, SE.,M.Si²), (Dr. Suharwan, SE.,SU³)

¹Manajemen, PPS STIE AMKOP Makassar

email : asrianip150@gmail.com

²Manajemen, PPS STIE AMKOP Makassar

email : ansarakkas@gmail.com

³Manajemen, PPS STIE AMKOP Makassar

email : suharwan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2011-2016. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, artinya setiap elemen populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Hasil penelitian ini menyatakan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi daerah, Penghasilan perusahaan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan komponen pendapatan Asli daerah yang mempengaruhi Kinerja keuangan pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi secara parsial Pajak Bumi dan Bangunan dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar.

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Makassar terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara simultan atau pun parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan.

ABSTRACT

The objective of this research was to find out how the local revenue (PAD) simultaneously and partially influence the financial performance of the government Makassar city South Sulawesi province. The data used were the APBD report and the APBD realization report of the city in the South Sulawesi province from 2011-2016. The analysis method used is quantitative analysis with multiple regression models.

The sampling in this research using technique of non-probability sampling by purposive sampling means that each population element has same possibility to be sampled. but partially the land tax and dominant building influence the financial performance of the government Makassar city.

The research result shows that local revenue (PAD) simultaneously has influence on financial performance, but partially only the earth and building taxes that dominantly influence financial performance, while local tax, user charges, company result and local wealth are not dominantly influence the financial performance on the government of Makassar city South Sulawesi. Based on research result and the discussion of the influence local revenue (PAD) Makassar city to the financial performance Makassar city

South Sulawesi, can be concluded that local revenue (PAD) simultaneously or partially influence to the financial performance on government of Makassar city South Sulawesi Province.

Keywords: Local Revenue, Financial Performance

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

Keuangan daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi di tahun 1998, hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan. Keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan pokok-pokok pemerintahan di daerah dengan Undang-undang No. 25 tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah (Abd. Halim, Muh. Syam Khusufi : 2010 Edisi Ke 4).

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan kepala daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan

- b. Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah apa saja yang secara dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan periode 2011 – 2016.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui perbedaan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang secara dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan periode 2011 – 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah:

- A. Manfaat bagi instansi pemerintah
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan informasi dalam rangka peningkatan kinerja Makassar di Sulawesi Selatan.
- B. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah khasana ilmu pengetahuan dibidang pemerintahan dan keuangan daerah dalam mengelola kinerja keuangan.
- C. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kaitannya Dengan Keuangan Pusat

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yakni sebagai berikut:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD Yang sah.

B. Penerimaan Pemerintah Daerah
Penerimaan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Samu,2005) di artikan sebagai uang yang masuk ke kas daerah, atau penerimaan yang didapat pemerintah daerah meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Secara garis besar sumber-sumber penerimaan atau cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendapatkan dana pada dasarnya dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak, adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipisahkan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk.
- b. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.
- c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara. Penerimaan dari sumber ini merupakan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Negara.
- d. Pinjaman. Pinjaman ini bisa dapat berasal dari luar Negeri maupun dari dalam Negeri.

2.6.1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003:34) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut AIA (2007:5) Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Pengertian kinerja keuangan menunjukkan kaitan yang cukup erat dengan penilaian mengenai sehat atau tidak sehatnya suatu perusahaan. Sehingga jika kinerjanya baik, maka baik pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan menurut Mulyadi (2007) adalah penentuan secara periodic efektifitas operasional suatu organisasi atau karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan telah ditetapkan sebelumnya.

2.5. Analisis Rasio Keuangan Daerah

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Suyana, 2008).

Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Secara sederhana rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut (Mahsun dalam Suyana, 2008) :

Tabel 2.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 — 50	Konsultatif
Sedang	> 50 — 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 — 100	Delegatif

Sumber : Mashun (2006).

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan

yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

B. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen (Suyana, 2008).

Rasio efektivitas diukur dengan : (Suyana Utama, 2008).

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Mahsun, 2006: 187).

Tabel 2.2 Efektivitas Keuangan Daerah

Efektifitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektifitas
Sangat Efektif	> 100
Efektif	>90 - 100
Cukup Efektif	>80 - 90
Kurang Efektif	>60 - 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber : Mahsun (2006:187).

C. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan

anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen (Suyana, 2008). Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin.

Rasio efisiensi diukur dengan (Suyana, 2008) .

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Mahsun, 2006).

Tabel 2.3 Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektifitas
Sangat Efisien	≤ 60
Efisien	$>60 - 80$
Cukup Efisien	$>80 - 90$
Kurang Efisien	$>90 - 100$
Tidak Efisien	≥ 100

Sumber : Mahsun (2006:187)

D. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal. Dalam penelitian ini digunakan proporsi belanja publik karena belanja publik secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Rasio keserasian diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Suyana, 2008).

Secara sederhana rasio keserasian belanja dapat diformulasikan sebagai berikut (Suyana, 2008).

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja

dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut (Mahsun, 2006).

Tabel 2.4 Keserasian Belanja Keuangan Daerah

Keserasian Belanja Keuangan Daerah Otonom	Rasio Efektifitas
Sangat Efisien	0 – 20
Efisien	$>20 - 40$
Cukup Efisien	$>40 - 60$
Kurang Efisien	$>60 - 80$
Tidak Efisien	$>90 - 100$

Sumber : Mahsun (2006:187).

E. Rasio Upaya Fiskal

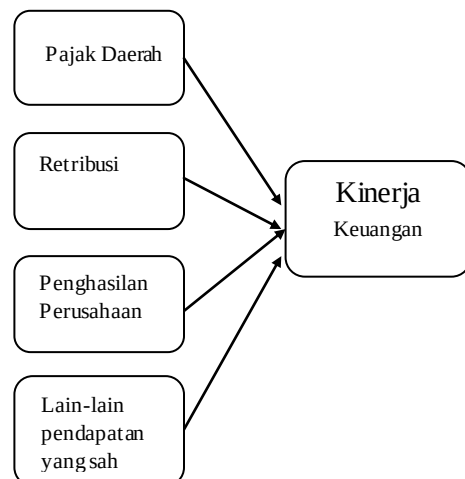
Rasio Upaya fiskal Bagian ini akan mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin tinggi hasil rasionya, akan semakin terlihat bahwa upaya pemerintah daerah semakin lebih baik dan adanya perencanaan yang baik dalam mengelola pendapatan.

F. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal, Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan.

Tabel 2.6. Kerangka Pemikiran



2.8. Penelitian Terdahulu

a. Eko Santoso pada tahun 2011, melakukan penelitian dengan judul Efisiensi dan Efektifitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ngawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dari sisi keuangan daerah. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penjabaran secara deskriptif yang meliputi: penyajian data, dan penarikan kesimpulan/Verifikasi. Sedangkan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Hasil analisis efisiensi pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa perhitungan dan formuli tingkat efisiensi secara keseluruhan rata-rata adalah sebesar 97,53% ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi masih rendah karena hasilnya kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih boros dalam menggunakan anggarannya.

b. Indah Yuliani Mone 2014 dengan Judul, Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila realisasi pembiayaan daerah meningkat maka akan menurunkan kinerja ekonomi daerah. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk

melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah.

C. Cherrya Dhia Wenny STIE MDP 2012 dengan Judul, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005-2009 yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi

daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada teori sebelumnya, maka dapat disimpulkan suatu kerangka fikir yang berfungsi sebagai penuntun, alur fikir dan sekaligus sebagai dasar dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- c. Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan
- b. Diduga bahwa Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan periode 2011 – 2016.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Kota Makassar selama periode 2011-2016, sedangkan waktu yang direncanakan untuk penelitian adalah 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2017.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tidak diperlukan sampel karena menggunakan data sekunder yang terbatas pada laporan realisasi APBD. Data yang digunakan terbatas pada data berapa jumlah realisasi APBD yang akan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota Makassar dan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Sedangkan faktor-faktor lain non finansial yang berpengaruh terhadap laporan realisasi APBD Kota Makassar dianggap konstan.

Data yang akan dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan perhitungan APBD yang dikumpulkan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dan data PDRB serta jumlah penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Data sekunder yang akan dipergunakan tersebut bersifat runtut waktu (*time series*) lima tahun dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2016. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan metode observasi non perilaku yaitu dilakukan dengan mengamati secara langsung dokumen APBD Kota Makassar.

3.3. Metode Analisis

Penulis menggunakan desain kausal dalam penelitian ini. Desain kausal dipakai untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Kuncoro, 2001).

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen dimana model persamaannya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kinerja (Variabel dependen)

A : Konstanta.

X1 : Pajak daerah (Variabel independen)

X2 : Retribusi daerah (Variabel independen)

X3 : Hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan (Variabel independen)

X4 : Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Variabel independen)

ε : Tingkat kesalahan pengganggu

3.4. Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis Yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusaan, Lain-lain PAD Yang sah.

2. Rasio kemandirian keuangan pemerintah provinsi menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen.

3. Rasio efektivitas keuangan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan dan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Kota Makassar yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen.

4. Rasio efisiensi keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen.

5. Rasio keserasian belanja daerah menggambarkan bagaimana pemerintah Provinsi memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pelayanan publik secara optimal yang diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen.

Dalam mengukur kinerja Keuangan melalui Pajak, Retribusi, pendapatan perusahaan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 4.1.3. Belanja Daerah Kota Makassar 2011-2016

Tahun	Tersedia	Digunakan	Persentase
2011	Rp. 75.428.724.000	Rp.65.651.019.687	87,04%
2012	Rp. 92.528.981.000	Rp.81.989.404.332	88,61%
2013	Rp. 81.989.404.332	Rp.73.373.004.705	89,49%
2014	Rp. 84.690.454.000	Rp.71.304.041.541	84,19%
2015	Rp. 88.646.140.900	Rp.64.648.408.341	72,50%
2016	Rp.134.075.758.000	Rp.69.501.978.759	51,84%

Berdasarkan table belanja daerah pada tahun 2011, belanja daerah yang tersedia sebesar Rp. 75.428.724.000, yang digunakan sebesar Rp. 65.651.091.687 atau 87,04%, tahun 2012 belanja daerah tersedia sebesar Rp. 92.528.981.000, yang digunakan sebesar Rp. 81.989.404.332, atau 88,61%, tahun 2013, belanja daerah yang tersedia sebesar Rp. 81.989.404.332, yang digunakan sebesar Rp. 73.373.004.705

tahun 2014, belanja daerah yang tersedia sebesar Rp.84.690.454.000, yang digunakan sebesar Rp. 71.304.041.541, atau 84,19%, tahun 2015, belanja daerah yang tersedia sebesar Rp.88.646.140.900, yang digunakan sebesar Rp. 64.640.408.341, atau 72,50%, tahun 2016, belanja daerah tersedia sebesar Rp. 134.075.758.000, yang digunakan sebesar Rp. 69.501.978.759, atau 51,84 %

Tabel 4.1.4 Tabel Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap APBD Kota Makassar

No	Tahun	PAD	%	Dana Perimbangan	%	Jumlah Pendapatan
1	2011	Rp.277.226.961.668	68,95	Rp.124.804.208.709	31,04	Rp.402.031.170.377
2	2012	Rp.395.659.198.905	71,13	Rp.160.543.559.310	28,86	Rp.556.202.758.215

3	2013	Rp.526.508.187.511	86,02	Rp.85.548.577.766	13,97	Rp.612.056.765.277
4	2014	Rp.569.793.996.657	86,94	Rp.85.568.124.366	13,05	Rp.655.362.121.023
5	2015	Rp.644.748.988.242	85,46	Rp.109.645.984.333	14,53	Rp.754.394.972.575
6	2016	Rp.769.933.158.172	87,53	Rp.109.645.984.333	12,46	Rp.879.579.142.505

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2017

Pada table Kontribusi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah kota Makassar tahun 2011, ketergantungan fiskal sebesar Rp. 124.804.208.709 (31,04%), dan kemampuan PAD nya sebesar Rp. 277.226.961.668 (68,95%) dari total APBD tahun 2012, ketergantungan fiskal sebesar Rp. 160.543.559.310 (28,86%) dan kemampuan PAD sebesar Rp. 395.659.198.905 (71,13%) Tahun 2013 ketergantungan 85.548.577.766 (13,97%) dan kemampuan PAD sebesar

Rp. 526.508.187.511 (86,02%) pada tahun 2014, ketergantungan sebesar Rp. 85.568.124.366 (13,05%) dan kemampuan PAD sebesar Rp. 569.793.996.657 (86,94%) pada tahun 2015 ketergantungan sebesar Rp. 109.645.984.333 (14,53%) dan kemampuan PAD sebesar Rp. 644.748.988.242 (85,46%) Pada tahun 2016 ketergantungan sebesar Rp. 109.645.984.333 (12,46%) dan kemampuan PAD sebesar Rp. 769.933.158.172 (87,53%).

Tabel 4.1.5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2011-2016.

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2011	Rp. 269.892.056.000	Rp.277.226.961.668	102,72%
2	2012	Rp. 347.594.900.000	Rp.395.659.198.905	113,83%
3	2013	Rp. 395.659.198.905	Rp.526.508.187.511	133,07%
4	2014	Rp. 681.762.822.000	Rp.569.793.996.657	83,58%
5	2015	Rp. 801.449.943.000	Rp.644.748.988.242	80,45%
6	2016	Rp.1.075.879.830.000	Rp.769.933.158.172	71,56%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun 2016

Berdasarkan target dan realisasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut pada tahun 2011, target direncanakan mencapai Rp. 269.892.056.000, yang relisasi sebesar Rp. 277.226.961.668, atau 102%, tahun 2012 target direncanakan mencapai Rp. 347.594.900.000, yang realisasinya sebesar Rp. 395.659.198.905, atau 113% berbeda 100% dari tahun sebelumnya, tahun 2015 target direncanakan mencapai Rp. 801.449.943.000, yang realisasinya

mencapai sebesar Rp. 526.508.187.511, atau 133,07%, tahun 2014, target direncanakan mencapai Rp. 681.762.822.000, yang terealisasi sebesar Rp. 569.793.996.657, atau, 83%, tahun 2015, target direncanakan mencapai Rp. 801.449.943.000, yang realisasinya sebesar Rp. 644.748.988.242, atau 80%, tahun 2016, target direncanakan mencapai Rp. 1.075.879.830.000 yang terealisasi sebesar Rp. 769.933.158.172 dengan persentase 71,56%.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Variabel Kinerja Keuangan

Analisis terhadap variabel kinerja keuangan kota Makassar pada

dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah di masa lalu. Dalam penelitian ini, variabel kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah antara lain dapat dideskripsikan sebagai berikut :

A. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Hasil perhitungan rasio kemandirian PAD Makassar dapat dilihat pada Tabel 4.1.6 berikut ini :

Tabel 4.1.6 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Pendapatan Daerah Kota Makassar.

TAHUN	PAD	Total Belanja Daerah	Persentase (%)
2011	Rp.277.226.961.668	Rp.65.651.019.687	4,22
2012	Rp.395.659.198.905	Rp.81.989.404.332	4,82
2013	Rp.526.508.187.511	Rp.73.373.004.705	7,17
2014	Rp.569.793.996.657	Rp.71.304.041.541	7,99
2015	Rp.644.748.988.242	Rp.64.648.408.341	9,97
2016	Rp.769.933.158.172	Rp.69.501.978.759	11,07

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan perhitungan rasio Kemandirian Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2011, PAD mencapai Rp. 277.226.961.668, dibagi dengan total belanja daerah sebesar Rp.65.651.019.687 dengan hasil persentase 4,22%, pada tahun 2012,

PAD mencapai Rp. 395.659.198.905, dibagi dengan total belanja daerah sebesar Rp. 81.989.404.332 dengan hasil persentase 4,82 %, pada tahun 2013, PAD mencapai Rp. 526.508.187.511, dibagi dengan total belanja daerah sebesar Rp. 73.373.004.705 dengan hasil persentase 7,17 %, pada tahun 2014, PAD mencapai Rp. 569.793.996.657, dibagi dengan total belanja daerah sebesar Rp. 71.304.041.541 dengan hasil persentase 7,99 %, tahun 2015 PAD mencapai Rp 644.748.988.242 dibagi dengan total belanja daerah sebesar Rp. 64.648.408.341 dengan hasil persentase 9,97 %, tahun 2016 PAD mencapai Rp 769.933.158.172 dibagi dengan total belanja daerah sebesar Rp.

B. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen (Suyana, 2008)

Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan PAD Makassar dapat dilihat pada Tabel 4.1.7 berikut ini :

TAHUN	Realisasi Pendapatan	Anggar. Pendapatan	Persentase (%)
2011	Rp.227.226.961.668	Rp. 269.892.056.000	0,84
2012	Rp.395.659.198.905	Rp. 347.594.900.000	1,13
2013	Rp.526.508.187.511	Rp. 395.659.198.905	1,33
2014	Rp.569.793.996.657	Rp. 681.762.822.000	0,83
2015	Rp.664.748.988.242	Rp. 801.449.943.000	0,82
2016	Rp.769.933.158.172	Rp.1.075.879.830.000	0,71

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan perhitungan rasio Efektifitas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2011, Realisasi Pendapatan mencapai Rp. 277.226.961.668, dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 269.892.056.000 dengan hasil persentase 0,84%, pada tahun 2012, Realisasi Pendapatan mencapai Rp.

395.659.198.905, dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 347.594.900.000 dengan hasil persentase 1,13 %, pada tahun 2013, Realisasi Pendapatan mencapai Rp. 526.508.187.511, dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 395.659.198.905 dengan hasil persentase 1,33 %, pada tahun 2014, Realisasi Pendapatan mencapai Rp.

569.793.996.657, dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 681.762.822.000 dengan hasil persentase 0,83 %, tahun 2015 Realisasi Pendapatan mencapai Rp 644.748.988.242 dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 801.449.943.000 dengan hasil persentase 0,82 %, tahun 2016 Realisasi Pendapatan mencapai Rp 769.933.158.172 dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar

Tabel 4.1.8 berikut ini :

TAHUN	Realisasi Belanja Daerah	Anggarn. Belanja Daerah	Persentase (%)
2011	Rp. 65.651.019.687	Rp. 75.428.724.000	0,87
2012	Rp. 81.989.404.332	Rp. 92.528.981.000	0,88
2013	Rp. 73.373.004.705	Rp. 81.989.404.332	0,89
2014	Rp. 71.304.041.541	Rp. 84.690.454.000	0,84
2015	Rp. 64.648.408.341	Rp. 88.646.140.900	0,72
2016	Rp. 69.501.978.759	Rp. 134.075.758.000	0,51

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan perhitungan rasio Rasio efisiensi Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2011, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 65.651.019.687, dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp. 75.428.724.000 dengan hasil persentase 0,87%, pada tahun 2012, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 81.989.404.332, dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp. Rp. 1.075.879.830.000 dengan hasil persentase 0,71 %,

C. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen (Suyana, 2008). Hasil perhitungan rasio efisiensi PAD Makassar dapat disajikan pada

92.528.981.000 dengan hasil persentase 0,88 %, pada tahun 2013, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 73.373.004.705, dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp. 81.989.404.332 dengan hasil persentase 0,89 %, pada tahun 2014, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 71.304.041.541, dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp. 84.690.454.000 dengan hasil persentase 0,84%, tahun 2015 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 64.648.408.341 dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp. 88.646.140.900 dengan hasil persentase 0,72 %, tahun 2016 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 69.501.978.759 dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp. 134.075.758.000 dengan hasil persentase 0,51 %.

D. Rasio Kesenjangan Belanja

Rasio kesenjangan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi

dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal. Hasil perhitungan rasio

keserasian belanja PAD Makassar dapat disajikan pada Tabel 4.1.8 berikut ini :

TAHUN	Belanja Layanan Publik	Total Belanja Daerah	Persentase (%)
2011	Rp. 75.428.724.000	Rp.65.651.019.687	1,14
2012	Rp. 92.528.981.000	Rp.81.989.404.332	1,12
2013	Rp. 81.989.404.332	Rp.73.373.004.705	1,11
2014	Rp. 84.690.454.000	Rp.71.304.041.541	1,18
2015	Rp. 88.646.140.900	Rp.64.648.408.341	1,37
2016	Rp.134.075.758.000	Rp.69.501.978.759	1,92

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian belanja Daerah Kota Makassar pada tahun 2011, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 75.428.724.000, dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp. 65.651.019.687 dengan hasil persentase 1,14%, pada tahun 2012, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 81.989.404.332, dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp. 92.528.981.000 dengan hasil persentase 1,12 %, pada tahun 2013, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 73.373.004.705, dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp. 81.989.404.332 dengan hasil persentase 1,11 %, pada tahun 2014, Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 71.304.041.541, dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp.

84.690.454.000 dengan hasil persentase 1,18%, tahun 2015 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 64.648.408.341 dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp. 88.646.140.900 dengan hasil persentase 1,37%, tahun 2016 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 69.501.978.759 dibagi dengan Anggaran Belanja daerah sebesar Rp. 134.075.758.000 dengan hasil persentase 1,92%,

D. Rasio Upaya Fiskal

Rasio Upaya fiskal mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi hasil rasionya, akan semakin terlihat bahwa upaya pemerintah daerah semakin lebih baik dan adanya perencanaan yang baik dalam mengelola pendapatan.

Hasil perhitungan rasio Upaya Fiskal PAD Makassar dapat disajikan pada Tabel 4.1.9 berikut ini :

TAHUN	Realisasi Pendapatan	Anggarn. Pendapatan	Persentase (%)
2011	Rp.227.226.961.668	Rp. 269.892.056.000	0,84
2012	Rp.395.659.198.905	Rp. 347.594.900.000	1,13
2013	Rp.526.508.187.511	Rp. 395.659.198.905	1,33
2014	Rp.569.793.996.657	Rp. 681.762.822.000	0,83
2015	Rp.664.748.988.242	Rp. 801.449.943.000	0,82
2016	Rp.769.933.158.172	Rp.1.075.879.830.000	0,71

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan perhitungan rasio Upaya Fiskal Daerah Kota Makassar

pada tahun 2011, Realisasi Pendapatan mencapai Rp. 227.226.961.668, dibagi

dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 269.892.056.000 dengan hasil persentase 0,84%, pada tahun 2012, Realisasi Pendapatan mencapai Rp. 395.659.198.905, dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 347.594.900.000 dengan hasil persentase 1,13 %, pada tahun 2013, Realisasi Pendapatan mencapai Rp. 526.508.187.511, dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 395.659.198.905 dengan hasil persentase 1,33 %, pada tahun 2014, Realisasi Pendapatan mencapai Rp. 569.793.996.657, dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 681.762.822.000 dengan hasil persentase 0,83 %, tahun 2015 Realisasi Pendapatan mencapai Rp 644.748.988.242 dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 801.449.943.000 dengan hasil persentase 0,82 %, tahun 2016 Realisasi Pendapatan mencapai Rp 769.933.158.172 dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.075.879.830.000 dengan hasil persentase 0,71 %,

D. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal, menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan.

Hasil perhitungan rasio Desentralisasi Fiskal PAD Makassar dapat disajikan pada Tabel 4.1.10 berikut ini :

TAHUN	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Persentase (%)
2011	Rp.227.226.961.668	Rp. 269.892.056.000	0,84
2012	Rp.395.659.198.905	Rp. 347.594.900.000	1,13
2013	Rp.526.508.187.511	Rp. 395.659.198.905	1,33
2014	Rp.569.793.996.657	Rp. 681.762.822.000	0,83
2015	Rp.644.748.988.242	Rp. 801.449.943.000	0,82
2016	Rp.769.933.158.172	Rp.1.075.879.830.000	0,71

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan perhitungan rasio Efektifitas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2011, Realisasi Pendapatan mencapai Rp. 277.226.961.668, dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 269.892.056.000 dengan hasil persentase 0,84%, pada tahun 2012, Realisasi Pendapatan mencapai Rp. 395.659.198.905, dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 347.594.900.000 dengan hasil persentase 1,13 %, pada tahun 2013, Realisasi Pendapatan mencapai Rp. 526.508.187.511, dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 395.659.198.905 dengan hasil persentase 1,33 %, pada tahun 2014, Realisasi Pendapatan mencapai Rp. 569.793.996.657, dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 681.762.822.000 dengan hasil persentase 0,83 %, tahun 2015 Realisasi Pendapatan mencapai Rp 644.748.988.242 dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 801.449.943.000 dengan hasil persentase 0,82 %, tahun 2016 Realisasi Pendapatan mencapai Rp 769.933.158.172 dibagi dengan Anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.075.879.830.000 dengan hasil persentase 0,71 %.

4.3. Analisis Statistik Deskriptif

Data dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi dan target APBD Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2011-2012.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan daerah, rasio daerah, dan kewenangan daerah, serta rasio PAD yang dapat Statistik deskriptif dari variabel tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2: Nilai Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	6	,84	4,22	1,4583	1,35803
x2	6	,88	4,82	1,7087	1,53087
x3	6	,89	7,17	2,4933	2,44440
x4	6	,83	7,99	2,0833	2,89700
Y	6	,72	9,97	2,4200	3,70608
A	6	,51	11,07	2,6050	5,17822
Valid N (listwise)	6				

Sumber : Hasil pengolahan data 2011-2016

Semua variabel memiliki nilai maksimum dan minimum positif. Data tabel tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel pajak daerah memiliki nilai minimum 0,84 dan maksimum 4,22 dengan rata-rata pajak daerah sebesar 1,4583 serta jumlah sampel dari perhitungan rasio selama 6 tahun yaitu data 2011-2016.
2. Variabel retribusi daerah memiliki nilai minimum 0,88 dan maksimum 4,82 dengan rata-rata retribusi daerah sebesar 1,7017 serta jumlah sampel dari perhitungan rasio selama 6 tahun yaitu data 2011-2016.
3. Variabel hasil perusahaan dan kekayaan daerah memiliki nilai minimum 0,89 dan maksimum 4,82 dengan rata-rata hasil perusahaan dan kekayaan daerah sebesar 2,1933 serta jumlah sampel dari perhitungan rasio selama 6 tahun yaitu data 2011-2016.
4. Variabel lain-lain PAD yang sah memiliki nilai minimum 0,83 dan maksimum 7,99 dengan rata-rata lain-lain PAD yang sah sebesar 2,0833 serta jumlah sampel dari perhitungan rasio selama 6 tahun yaitu data 2011-2016.
5. Variabel kinerja memiliki nilai minimum 0,72 dan maksimum 9,97 dengan rata-rata kinerja daerah sebesar 2,4200 serta jumlah sampel

dari perhitungan rasio selama 6 tahun yaitu data 2011-2016.

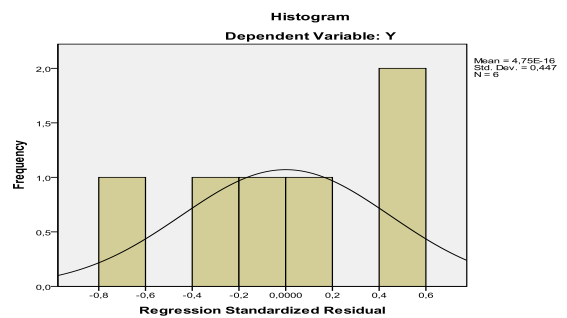
4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

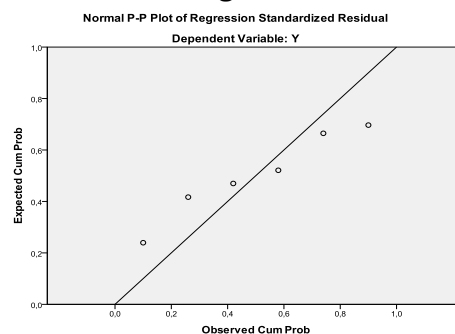
Data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal serta grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal. Pengujian normalitas juga dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Nilai K-S dari pengolahan data

tersebut sebesar 0,618 dan signifikansi sebesar 0,840 ($0,840 > 0,05$), maka disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.



Gambar 2: Histogram dan P-Plot



Tabel 3 : Nilai Uji Statistik Non-Parametrik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Standar
N		
Normal Parameters a,b	Mean Std. Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative	
Kolmogorov-Smirnov Z		
Asymp. Sig. (2-tailed)		

Sumber : Hasil pengolahan data 2017

4.3. Analisis Regresi

4.3.1. Persamaan Regresi

Tabel 6 : Nilai Koefisien Regresi Untuk Kinerja Keuangan Dengan Komponen PAD

<i>Coefficients^a</i>					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	128,354	151,282		,848	,552
x1	6,259	6,356	1,126	,985	,505
x3	17,802	167,181	,164	,106	,932
x4	14,301	112,755	,143	,127	,920
x6	41,620	51,728	,609	,805	,569

Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil pengolahan data 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 128,354 - 6,259 X_1 - 17,802 X_2 - 14,301 X_3 - 41,602 X_4$$

Keterangan:

- Konstanta sebesar 128,354 menunjukkan apabila tidak ada variabel independen, maka kinerja sebesar 128,354;
- β_1 sebesar 6,259 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak daerah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar 6,259 dengan asumsi variabel lain tetap ;
- β_2 sebesar 17,802 menunjukkan bahwa setiap kenaikan retribusi daerah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar 17,802 dengan asumsi variabel lain tetap
- β_3 sebesar 14,301 menunjukkan bahwa setiap kenaikan hasil perusahaan dan kekayaan daerah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar 14,301 dengan asumsi variabel lain tetap ;
- β_4 sebesar 41,602 menunjukkan bahwa setiap kenaikan lain-lain PAD yang sah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar

41,602 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.3.2. Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,999 berarti korelasi antara kinerja dengan variabel independennya (pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah) sangat kuat karena lebih dari 0,5. *Adjusted R square* atau koefisien korelasi sebesar 0,998 berarti 99,8% variasi atau perubahan dalam kinerja dapat dijelaskan oleh variasi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah, sedangkan sisanya 5,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain.

Tabel 7: Koefisien Korelasi Antara Kinerja Dengan Komponen PAD

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	,999 ^a	,998	,998	

a. Predictors: (Constant), Efektifitas

b. Dependent Variable: Kemandirian

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1 Uji T (T-Test)

Tabel 8: Nilai T-Hitung Untuk Komponen PAD

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	128,354	151,282		,848	,552
x1	6,259	6,356	1,126	,985	,505
x3	17,802	167,181	,164	,106	,932
x4	14,301	112,755	,143	,127	,920
x6	41,620	51,728	,609	,805	,569

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil pengolahan data 2017

Tabel di atas menunjukkan :

- Variabel pajak daerah, t hitung $< t$ tabel ($0,985 < 6,259$), Signifikansi menunjukkan angka $> 0,05$ H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- Variabel retribusi daerah, t hitung $< t$ tabel ($0,106 < 17,802$), Signifikansi menunjukkan angka $> 0,05$ H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- Variabel hasil perusahaan dan kekayaan daerah, besarnya, t hitung $< t$ tabel ($,127 < 14,301$), Signifikansi menunjukkan angka $> 0,05$ H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- Variabel lain-lain PAD yang sah, t hitung $> t$ tabel ($0,805 < 41,620$), Signifikansi menunjukkan angka $< 0,05$ H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square
1 Regression	913,536	4	228,384
Residual	380,843	1	380,843
Total	1294,379	5	

a. Predictors: (Constant), x6, x1, x4, x3

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil pengolahan data 2017

5. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian mengenai pengaruh PAD terhadap

kinerja keuangan pada kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan SPSS versi 17, diketahui bahwa secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,998 menunjukkan 99,8% variasi atau perubahan dalam kinerja dapat dijelaskan oleh variasi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Penelitian juga dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

5.1. Kinerja Keuangan

A. Tingkat Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah

Kota Makassar dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah atau yang sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal.

PAD memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itu PAD diharapkan dapat menjadi bagian terbesar dari seluruh penerimaan daerah dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah kota Makassar, karena faktor penting dalam kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari PAD, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi dapat dikurangi.

Analisis tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota Makassar bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah yang bisa memperlihatkan tingkat kemandirian pemerintah d kota dalam melaksanakan otonomi daerah dan menilai kinerja keuangan pemerintah kota Makassar dalam melaksanakan kinerja keuangannya sesuai dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah kota Makassar Tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2011 , tetapi perbedaan peningkatan tersebut tidak bermakna terhadap perbedaan kinerja keuangan antara Tahun 2011 dan Tahun 2016 . Peningkatan kemandirian keuangan pemerintah Kota Makassar Tahun 2011 menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah yang dimiliki dibandingkan pada tahun sebelumnya, terbukti dari laporan perhitungan APBD Kota Makassar tahun 2011-2016, rata-rata pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan seperti pemungutan pajak

daerah, retribusi daerah, pendapatan Perusahaan yang ada, sumbangan pihak ketiga (investor yang menanamkan modalnya) atau yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pola hubungan antara pemerintah Kota dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi selama I periode dapat digolongkan menjadi pola hubungan yang delegatif, hal ini berarti bahwa pemerintah Kota dan Provinsi telah menjalankan amanat dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi sehingga sudah mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi dengan adanya upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah, maka akan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi dan mampu menjalankan fungsi otonomi daerah dengan baik.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa PAD berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini sependapat dengan Dwirandra (2008), dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengurangi ketergantungan pemerintah kabupaten kepada pusat yang pada prinsipnya semakin besar PAD dalam APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dacosta (2002) yang meneliti tingkat kemandirian Kota Kupang, menyatakan bahwa secara rata-rata derajat otonomi fiskal Kota Kupang selama tahun 1997 — 2001 dikategorikan sangat kurang karena berada di bawah 25%.

Selain itu, penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2008) yang menyatakan bahwa terdapat tujuh kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah (rasio KKD 0% sampai dengan 25%) sedangkan satu kabupaten tergolong memiliki tingkat kemandirian sedang (rasio KKD lebih dari 50% sampai dengan 75%).

B. Tingkat Efektivitas

Tingkat efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan pemerintah kota dan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas keuangan pemerintah kota Makassar pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011, namun perbedaan peningkatan tersebut tidak bermakna terhadap perbedaan kinerja keuangan antara tahun 2011 dan tahun 2016. Dengan peningkatan efektivitas di tahun 2016, maka hal ini berarti bahwa, pemerintah berhasil merealisasikan pendapatan asli daerah dan pendapatan non asli daerah seperti dana perimbangan pemerintah pusat dan provinsi melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bantuan keuangan lainnya. Realisasi pendapatan tersebut belum melebihi jumlah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah kota untuk memperoleh pendapatan.

C. Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi dimaksudkan untuk menilai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 lebih efisien dibandingkan dengan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di tahun 2011, namun perbedaan penurunan tingkat efisiensi tersebut tidak bermakna terhadap perbedaan kinerja keuangan antara tahun 2011 dan tahun 2016. Peningkatan efisiensi keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2016 terjadi karena realisasi anggaran belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meningkat signifikan terhadap total anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, dengan kata lain, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan cenderung menggunakan seluruh anggaran belanja yang ada.

D. Tingkat Kesenjangan Belanja

Tingkat keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah Kota memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pelayanan publik secara optimal sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakatnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Hasilnya menyatakan bahwa secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat penelitian ini masih memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun pengamatan serta menambah jumlah sampel yang akan diteliti sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan dasar.

Hasilnya menyatakan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

A. Kinerja keuangan

Hasil penelitian terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan tingkat kemandirian, tingkat efektivitas, tingkat efisiensi dan tingkat keserasian belanja dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Tingkat kemandirian

Ditinjau dari aspek kemandirian keuangan pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan di tahun 2011 tidak berbeda signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan di tahun 2016. Meskipun hasil perhitungan rata-rata tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan di

tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011.

b) Tingkat efektivitas

Ditinjau dari aspek efektivitas keuangan pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan di periode I tidak berbeda signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan di tahun 2011 Meskipun hasil perhitungan rata-rata tingkat efektivitas keuangan pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan di tahun 2011

c) Tingkat efisiensi

Ditinjau dari aspek efisiensi keuangan pemerintah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan di tahun 2011 tidak berbeda signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan di tahun 2016 Hasil perhitungan rata-rata tingkat efisiensi keuangan pemerintah kota Makassar di tahun 2016 menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan di tahun 2011.

d) Tingkat keserasian belanja

Ditinjau dari aspek keserasian belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan di tahun 2011 tidak berbeda signifikan terhadap rata-rata kinerja keuangan di tahun 2016. Hasil perhitungan rata-rata tingkat keserasian belanja pemerintah kota Makassar menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan dengan di tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Halim, Muh.Syam Khusufi 2010 :

Keuangan Negara dan Daerah Edisi Ke 4

Aristoteles dalam Kirdi Dipoyudo, , Jakarta: CV. Rajawali Keadilan Sosial

Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih 2010 (Jurnal Bisnis dan Ekonomi), Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo

Adisasmita, Rahardjo. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Bastian, Indra. 2006.** *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Batubara, Dian Nofrina. 2009.** *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19120/7/Cover.pdf>, diakses tanggal 4 Desember 2010).
- Cherriya 2012 :** *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*
- Decay dalam Wahyudi Kumorotomo, 2005, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada** *Etika Administrasi Negara*
- Halim, 2007:** *Analisis Rasio Keuangan Terhadap APBD*
- Haryanto, Joko Tri, Potret PAD dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah.** Artikel Online. (<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbckf/kajian%5CPAD.pdf>, diakses tanggal 4 Desember 2010)
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007.** *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN.
- Indara Bastian 2007:** *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi Ke 2*, Penerbit Salemba Empat
- Mardiasmo. 2002.** *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pramuji dan Kaho 1998 dalam (Heny Susantih dan Yulia Saftiana 2009)** *Perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah propinsi sumatera bagian selatan1)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010** Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur Sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Jakarta 2010.
- Suyana, 2008 :** *Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total belanja daerah*
- Soedjono Dirdjosisworo, 2003, Penerbit Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, Pengantar Ilmu Hukum**
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007.** *Analisa PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran. The 1st Accounting Conference*. Jakarta.
- Suharjo, Bambang, 2008.** *Analisis Regresi Terapan dengan SPSS*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD** tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 2006. Depdagri RI.
- Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia, 2008.** *Perbandingan Indikator Efisiensi dan Efektivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. "Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya"* (tidak dipublikasikan).
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Adi, Priyo Hari. 2007.** *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.
- Tjerk, Budding. 2008.** *"Decentralization, Performance Evaluation and Government Performance"*. De VU Public Controlling reeks is een uitgave van de postgraduate opleiding tot controller in de publieke en non-profit sector van de Vrije Universiteit Amsterdam, kamer 2A19, De Boelelaan 1105,
- Rahmat 2015, Evaluasi Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gowa Pada Periode I dan Periode II.**
- Roberto Di Pietra dan Faraci, Rosario. 2010.** *"Antecedents of Entrepreneurial Governance Within Firms: The Italian Contribution to Strategic Management"*. Journal of Management & Governance. Springer Science & Business Media, LLC. 10.1007/s10997-010-9150